

## **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019**

**Markus Rivaldo Yulinchton**

**Maria Bernadette Nani Ariani**

**Nunuk Triwahyuningtyas**

Ilmu Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

*Korespondensi penulis: markus.rivaldo@upnvj.ac.id*

**Abstract.** *This study aims to obtain the level of financial performance of the Government of Tegal Regency, Central Java Province. The sample used is the 2016-2019 Tegal Regency Budget Realization Report. The analysis technique used uses five different ratios, namely the ratio of regional financial independence, effectiveness ratio, growth ratio, harmony ratio, and fiscal decentralization ratio. The data collection technique was carried out by taking the data on the BPS (Central Bureau of Statistics) Tegal Regency website. The results show that the ratio of regional financial independence in the regional financial statements of Tegal Regency has an instructive pattern, while the effectiveness ratio is in the ineffective area. Other results show that the growth ratio is fluctuating, the compatibility ratio is in an unbalanced condition, and the ratio of fiscal decentralization is in a low category.*

**Keywords:** *Regional financial independence ratio; Effectiveness ratio; Growth ratio; Compatibility ratio; Fiscal decentralization ratio.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tegal tahun 2016-2019. Teknik Analisis yang digunakan menggunakan lima macam rasio, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, dan rasio desentralisasi fiskal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data tersebut pada *website* BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dalam laporan keuangan daerah Kabupaten Tegal memiliki pola instruktif, sedangkan rasio efektifitas berada pada area tidak efektif. Hasil lainnya menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan bersifat fluktuatif, rasio keserasian berada pada kondisi tidak berimbang, dan rasio desentralisasi fiskal berada pada kategori rendah.

**Kata Kunci:** Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD); Rasio efektifitas; Rasio pertumbuhan; Rasio keserasian; Rasio desentralisasi fiskal.

---

**Article Info:**

Received: September 15, 2021

Accepted: February 21, 2022

Available online: March 30, 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893>

---

## LATAR BELAKANG

Sektor publik merupakan bagian dari dan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah dan berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber pendanaan sektor publik berasal dari masyarakat, seperti retribusi daerah dan pajak. Keuangan daerah tidak terlepas dari tata cara pengelolaan yang dipisahkan dan dimiliki oleh daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dan terikat pada undang-undang yang berlaku (Horota, Riani, & Marbun, 2017). Desentralisasi daerah mewujudkan sebuah pelaksanaan kebebasan bagi daerah atau otonomi daerah, sehingga tugas dan wewenang kepala daerah untuk mengurus dan mengatur roda pemerintahan di tingkat daerah harus melihat pada potensi yang dimiliki daerah dan seluruh kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam kegiatan otonomi daerah dan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pada daerah dimulai dari awal perencanaan hingga pengawasan keuangan daerah tersebut. Peningkatan kinerja dikatakan berhasil apabila selaras dengan peraturan pemerintah (Setianingrum & Haryanto, 2020). Sistem desentralisasi fiskal atau otonomi daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat yang dijadikan proses pemulihan dan evaluasi kinerja dengan membuat sebuah perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya, serta menjadi tolak ukur dari periode ke periode untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kerjanya (Rahmayati, 2016).

Sebagai bagian dari kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan umum, kinerja keuangan daerah sebagai roda pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib dituangkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban sebagai evaluasi. Pemerintah daerah menyampaikannya kepada masyarakat sebagai pelaksanaan keterbukaan informasi dan keefektifan anggaran yang digunakannya dengan baik (Istiqomah, 2018). Berbagai bentuk penyelewengan anggaran ada pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sehingga hal itu membuat konsentrasi masyarakat fokus pada kinerja pemerintahan Tegal. Masa kekuasaan pemerintahan yang sebelumnya telah membuat masyarakat marah dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Tegal. Pembangunan pemerintahan mempunyai dua bagian utama, yaitu sebagai subyek sekaligus obyek agar pemerintah daerah menerapkan transparansi anggaran dan meningkatkan efektivitas anggaran (Christia & Ispriyarso, 2019).

Desentralisasi fiskal dimulai pada tahun 2001 yang ditandai berlakunya sistem desentralisasi fiskal atau otonomi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut dijadikan sebagai proses pemulihan dan evaluasi kinerja dengan membuat sebuah perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya, serta menjadi tolak ukur dari periode ke periode untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kinerja. Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila memiliki penilaian kemandirian kinerja keuangannya baik, efektif, pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terus meningkat, dan proporsi antara belanja modal dan belanja operasional yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah

daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan kinerja keuangannya agar sumber daya yang dimiliki daerah dapat dioptimalkan. Penelitian sebelumnya oleh Anggraini (2015) menggunakan rasio keuangan, yaitu kemandirian keuangan daerah, kemampuan daerah, dan rasio efektivitas pada Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2010-2014, sedangkan penelitian ini menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio keserasian dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tegal tahun anggaran 2016-2019.

Persentase realisasi PAD terhadap target PAD di atas 100% atau disebut efektif. Penurunan persentase PAD terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018, PAD Kabupaten Tegal berada pada angka 88,886%, sedangkan tahun 2019 realisasinya mencapai angka 97,201%. Jika persentase realisasi PAD terhadap target PAD kurang dari 100% disebut tidak efektif, sehingga perbandingan antara realisasi anggaran terhadap target PAD Kabupaten Tegal pada tahun 2018 dan 2019 dapat dikatakan tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan adanya pemilihan kepala daerah Kabupaten Tegal pada tahun 2018 sebanyak dua kali pergantian. Pergantian kepala daerah Kabupaten Tegal tersebut membuat perubahan kinerja dan kebijakan yang diambil pada masa transisi pemerintahan Kabupaten Tegal, sehingga penurunan pendapatan dan pajak daerah terjadi pada masa itu.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut, rendahnya kemampuan keuangan daerah yang dilihat dari tingginya angka pendapatan transfer pada Kabupaten Tegal. Penurunan tingkat efektifitas Kabupaten Tegal dapat dilihat dari perbandingan realisasi PAD terhadap target PAD, sehingga terjadi penurunan yang tercermin dari laporan realisasi anggaran Kabupaten Tegal pada tahun 2018 dan 2019 dan tingginya angka belanja operasional dibandingkan belanja modal. Dari kondisi tersebut, penelitian ini memberikan perhatian khusus agar menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal. Adanya ekspektasi pada angka realisasi PAD yang tidak sesuai dan sangat jauh dari target PAD yang ditetapkan menjadi dasar pentingnya penelitian ini untuk melihat faktor-faktor di dalamnya.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Keuangan Publik (*Public Finance*)**

Keuangan publik merupakan cabang ekonomi yang mempelajari kegiatan pajak dan pengeluaran pemerintah (Samalam, Mangantar, & Saerang, 2018). Pertanyaan-pertanyaan penting dalam memahami keuangan publik bukanlah masalah keuangan saja. Meskipun terkait dengan aspek keuangan, tetapi masalah utamanya adalah sumber daya riil. Keuangan publik dapat dipahami pula sebagai studi tentang intervensi pemerintah dalam pengaturan pasar atau *marketplace* (Jaelani, 2015).

### **Konsep Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai dana atau kekayaan yang dikelola dengan peraturan setempat (Rahayu, Sarwono, & Sunarti, 2020). Keuangan daerah menjadi kewajiban dan hak dengan mendasarkan pada penilaian uang, serta sesuatu berdasarkan nilai uang maupun produk yang dapat dijadikan harta daerah sepanjang tidak dimiliki atau dikuasai oleh negara atau pun daerah lain dengan jabatan yang tinggi maupun pihak-pihak lainnya sesuai kebijakan perundang-undangan yang berlaku (Li, Wu, & Xiao, 2020).

## **Konsep Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil kegiatan yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam bentuk kuantitas dan kualitas terukur terkait penggunaan anggaran daerah menjadi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut (Pangkey, Saerang, & Tulung, 2017). Penggunaan dana dalam hal ini ditujukan untuk kebutuhan masyarakat setempat dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang (Satria & Sari, 2018).

## **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah menjadi organisasi yang menyelenggarakan pembangunan hingga pengabdian kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah tersebut memiliki tanggung jawab keuangan atas dana yang dihimpunnya dalam penilaian kinerja keuangan. Analisis keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis jumlah APBD pada pemerintah daerah tersebut (Halim, 2016). Beberapa pihak yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah (Halim, 2015): (1) Pihak eksekutif yang memberikan dasar-dasar penyusunan APBD berikutnya; (2) Pemerintah Pusat/Provinsi yang memberikan bahan masukan untuk mendorong terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah; dan (3) Pemerintah Kota/Kabupaten dan para kreditur.

## **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, sehingga semakin tinggi rasio kemandirian diartikan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah atau sebaliknya (Amin, 2015). Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan derajat mampu tidaknya suatu daerah melakukan pembiayaan kegiatan yang berhubungan dengan daerah tersebut, seperti pembangunan, pelayanan, hingga pembayaran pajak dan bea, sehingga kegiatan tersebut dapat dibiayai dari sumber pendapatan daerah tersebut. Rasio ini dapat dihitung dari jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain (misalnya penerimaan transfer), yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil SDA (sumber daya alam), pendapatan bukan pajak, dan pinjaman. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi (Smith & Desilasari, 2015).

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan derajat mampu tidaknya suatu daerah melakukan pembiayaan kegiatan yang berhubungan dengan daerah tersebut, seperti pembangunan, pelayanan, hingga pembayaran pajak dan bea, sehingga kegiatan tersebut dapat dibiayai dari sumber pendapatan daerah tersebut (Christia & Ispriyarso, 2019). RKKD dapat dihitung dari jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain (misalnya penerimaan transfer), yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil SDA (sumber daya alam), pendapatan bukan pajak, dan pinjaman (Smith & Desilasari, 2015).

## **Rasio Efektivitas PAD**

Angka efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pencapaian PAD yang dapat direalisasikan dibandingkan dengan target PAD yang dilihat dari potensi riil daerah. Ketika rasio efektivitas semakin tinggi, maka kinerja pemerintah daerah tersebut semakin baik (Miharja, Handajani, & Furkan, 2020).

## **Rasio Keserasian**

Rasio keserasian menunjukkan kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan peruntukan dananya secara optimal dalam mengelola pembiayaan operasional dan pembelanjaan modal. Jika persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi semakin tinggi, maka persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Hakim, 2020).

## **Rasio Pertumbuhan**

Pertumbuhan adalah suatu keadaan yang mengalami kondisi membaik atau berkembang yang berguna untuk mengetahui apakah pemerintah daerah mengalami pertumbuhan positif atau negatif dalam pendapatan atau pengeluaran pada tahun anggaran yang berjalan (Rahayu *et al.*, 2020). Laju pertumbuhan mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu bertahan dalam kondisi peningkatan yang dicapai dari satu periode ke periode selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan pada komponen sumber pendapatan dan pengeluaran yang dapat digunakan untuk menilai potensinya (Putriani, 2016).

## **Rasio Desentralisasi**

Derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Rahayu *et al.*, 2020). Rasio ini juga menunjukkan derajat kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, ini berarti bahwa semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan cakupan secara umum pada obyek penelitian yang memiliki jumlah dan gambaran yang telah ditentukan dan disimpulkan (Sugiyono, 2018). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal. Menurut Sugiyono (2018), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel memiliki kemampuan merepresentasikan populasi. Ukuran sampel adalah banyaknya sampel yang harus diambil dari suatu populasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tegal periode tahun 2016-2019.

### **Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data angka laporan keuangan, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kuantitatif berdasarkan perhitungan formula atau rumus rasio keuangan yang digunakan sesuai tujuan pada penelitian ini. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder (Noor, 2016).

### **Pengukuran Rasio Keuangan**

Pengukuran variabel adalah penetapan angka atau tabel untuk menentukan karakteristik atau atribut obyek, atau untuk setiap jenis fenomena atau kejadian yang meng-

gunakan aturan tertentu dengan menunjukkan jumlah dan/atau kualitas faktor yang ditinjau (Sugiyono, 2017:88). Pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Pengukuran Rasio Keuangan**

Rasio	Indikator	Rumus Perhitungan dan Referensi
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>0%-25%, tergolong rendah sekali dengan pola instruktif.</li> <li>25%-50%, tergolong rendah dengan pola konsutatif.</li> <li>50%-75%, tergolong sedang dengan pola partisipatif.</li> <li>75%-100%, tergolong tinggi dengan pola delegatif.</li> </ul>	Rumus: $RKKDn = \frac{PADn}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$ Keterangan: PAD=Pendapatan Asli Daerah n=tahun (Christia & Ispriyarso, 2019)
Rasio Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% (<math>x &lt; 100\%</math>) berarti tidak efektif.</li> <li>Jika nilainya sama dengan 100% (<math>x = 100\%</math>) berarti efektivitas seimbang.</li> </ul>	Rumus: Rasio Efektivitas PADn $= \frac{Realisasi\ PADn}{Anggaran\ PADn} \times 100\%$ Keterangan: PAD=Pendapatan Asli Daerah n=tahun (Smith & Desilasari, 2015)
Rasio Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika r bernilai negatif (-) maka dapat dikatakan pertumbuhan mengalami penurunan.</li> <li>Jika r bernilai positif (+) maka dapat dikatakan bahwa dari pertumbuhan sebuah PAD meningkat dari tahun sebelumnya.</li> </ul>	Rumus: $r = \frac{Pn - Po}{Po}$ Keterangan: r = Rasio Pertumbuhan Pn= Pertumbuhan pada tahun ke-n Po= Pertumbuhan pada awal tahun (Smith & Desilasari, 2015)
Rasio Keserasian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika Rasio Belanja Operasi lebih besar daripada rasio belanja modal maka, rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja daerah rendah.</li> <li>Jika Rasio Belanja Operasi lebih kecil daripada rasio belanja modal, maka rasio keserasian belanja modal terhadap total belanja daerah tinggi.</li> </ul>	Rumus: Rasio Belanja Operasi $= \frac{Total\ Belanja\ Oprasi\ n}{Total\ Belanja\ Daerah\ n} \times 100\%$ Rasio Belanja Modal $= \frac{Total\ Belanja\ Modal\ n}{Total\ Belanja\ Daerah\ n} \times 100\%$ Keterangan: n=tahun (Smith & Desilasari, 2015)
Rasio Desentralisasi Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> <li>0% - 10% : Sangat Rendah</li> <li>10.01%-20% : Rendah</li> <li>20.01-30% : Sedang</li> <li>30.01-40% : Cukup</li> <li>40.01-50% : Tinggi</li> <li>&gt;50% Sangat Tinggi</li> </ul>	Rumus: Rasio Desentralisasi Fiskal $= \frac{Realisasi}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$ (Christia & Ispriyarso, 2019)

Sumber: Referensi terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Diskripsi Obyek Penelitian

Kabupaten Tegal adalah salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah

yang beribukota Slawi dan memiliki 18 wilayah kecamatan. Wilayah Kabupaten Tegal memiliki letak yang sangat strategis yang menghubungkan wilayah Semarang, Tegal, dan Cirebon serta Semarang, Tegal, Purwokerto, dan Cilacap. Kabupaten Tegal memiliki fasilitas pelabuhan. Kabupaten Tegal memiliki batas wilayah dengan Kota Tegal dan Laut Jawa di arah utara, Kabupaten Pemalang di arah timur, Kabupaten Brebes di arah barat, serta Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di arah selatan (BPS Kabupaten Tegal, 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran terhadap APBD Kabupaten Tegal Tahun 2016-2019. Pendapatan total APBD tahun 2016 direncanakan sebesar Rp2.348.492.203.000. Namun, target tersebut tidak mencapai perolehan maksimal karena realisasinya sebesar Rp2.161.161.059.587,60 sehingga nilai APBD yang dianggarkan masih lebih besar dibandingkan angka realisasi. Angka pendapatan total Kabupaten Tegal diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Angka PAD Kabupaten Tegal tahun 2016 berada pada angka Rp312.688.892.000 dan angka realisasinya sebesar Rp316.051.189.733,60. Di sisi lain, angka pendapatan transfer Kabupaten Tegal tahun 2016 direncanakan Rp2.026.686.299.000 dan realisasinya sebesar Rp1.835.602.482.074. Pada tahun 2016, data belanja daerah pada APBD Kabupaten Tegal mencapai Rp2.373.791.649.000 yang terdiri atas belanja operasional sebesar Rp1.709.314.905.000 dan belanja modal sebesar Rp656.617.581.000, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp2.070.201.492.705 yang terdiri atas belanja operasional sebesar Rp1.546.321.787.664 dan belanja modal sebesar Rp516.642.310.814. Dari gambaran tahun 2016 tersebut, APBD Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa belanja daerah masih tidak berimbang, karena belanja operasional lebih mendominasi daripada belanja modal.

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Rangkuman perhitungan RKKD Kabupaten Tegal untuk periode tahun 2016-2019 ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil perhitungan RKKD pada Tabel 2 merupakan perbandingan antara realisasi PAD Kabupaten Tegal dan pendapatan transfer. Berdasarkan kriteria indikator di Tabel 1, RKKD Pemerintah Kabupaten Tegal periode tahun anggaran 2016-2019 rata-rata menunjukkan angka 18,53% yang dapat diartikan bahwa kondisi keuangannya bersifat instruktif.

**Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tegal**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Keterangan
2016	316.051.189.733,60	1.825.602.482.074	17,21%	Instruktif
2017	375.531.165.351,20	1.921.568.586.197	19,54%	Instruktif
2018	371.345.954.410,62	2.008.586.726.208	18,48%	Instruktif
2019	416.867.970.000,00	1.629.809.921.000	18,89%	Instruktif
<b>Rata-Rata</b>			<b>18,53%</b>	<b>Instruktif</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tegal (2021) diolah.

## Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Tegal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah, khususnya dalam pencapaian PAD yang dikomparasikan dengan sasaran menurut potensi riil pada daerah tersebut (Pradita, Hartono, & Mustoffa, 2019). Semakin tinggi rasio efektivitas, maka kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan semakin baik. Rekapitulasi perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Tegal pada periode tahun 2016-2019 disajikan pada Tabel 3. Hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3 adalah keefektifan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal pada periode tahun 2016-2019 rata-rata mencapai 97,158%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk merealisasikan PAD dari target mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Selama masa empat tahun tersebut, angka efektivitas 97,158% masih berada di bawah 100%. Mengacu pada indikator di Tabel 1, apabila rata-rata tingkat efektivitas kurang dari 100%, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal dikatakan tidak efektif.

**Tabel 3. Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tegal**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	Keterangan
2016	316.051.189.733,60	312.688.892.000	101,075%	Efektif
2017	375.531.165.351,20	370.089.012.000	101,470%	Efektif
2018	371.345.954.410,62	418.830.489.000	88,886%	Tidak Efektif
2019	416.867.970.000,00	428.867.970.000	97,201%	Tidak Efektif
<b>Rata – Rata</b>			<b>97,158%</b>	<b>Tidak Efektif</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tegal (2021) diolah.

## Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah metrik untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu bertahan dan meningkatkan pertumbuhan PAD dari periode ke periode berikutnya (Rahayu *et al.*, 2020). Rekapitulasi rasio pertumbuhan PAD pada belanja operasional dan belanja modal di Kabupaten Tegal pada tahun Anggaran 2016-2019 ditunjukkan pada Tabel 6. Perhitungan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa selama periode tahun anggaran 2016-2019, semua rasio mengalami fluktuasi. Rasio pertumbuhan menilai peningkatan kualitas keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari rasio perhitungan PAD, belanja operasional, dan belanja modal, sehingga indikator tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan menjadi stimulus agar peningkatan kinerja dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

Rasio pertumbuhan PAD tahun 2018 mengalami pertumbuhan negatif. Hal itu menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal kurang mengelola sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal. Hal tersebut didukung dengan teori *Public Finance* yang menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan dan mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan dengan baik. Kemampuan suatu daerah dalam memperoleh sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal dapat membentuk suatu daerah menjadi mandiri, sehingga daerah tersebut tidak selalu bergantung pada pendapatan transfer yang diberikan oleh pusat.

**Tabel 6. Rekapitulasi Rasio Pertumbuhan pada PAD, Belanja Operasional, dan Belanja Modal Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016-2019**

Keterangan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
PAD	316.051.189.733,60	375.531.165.351,20	371.345.954.410,62	416.867.970.000,00
Pertumbuhan PAD	3,96%	18,81%	-1,11%	12,25%
Belanja Operasional	1.546.321.787.664	1.611.513.759.083	1.704.320.211.333	1.637.467.847.000
Pertumbuhan Belanja Operasional	5,04%	4,21%	5,75%	-3,99%
Belanja Modal	516.642.310.814	437.758.902.809	417.983.021.935	481.781.153.000
Pertumbuhan Belanja Modal	102,44%	-15,26%	-4,517%	15,26%

Sumber: BPS Kabupaten Tegal (2021) diolah.

### Rasio Keserasian

Rasio keserasian bertujuan untuk menilai kinerja pemerintah secara optimal dalam mengalokasikan dana untuk pembiayaan operasional dan investasi (Budiono, 2020; Aditya & Azmansyah, 2021). Rasio ini bermakna ketika nilai porsi dana cukup tinggi untuk pengeluaran bisnis, hal itu berarti porsi dana untuk sarana dan prasarana bagi perekonomian melalui belanja modal cenderung rendah. Ringkasan rasio keserasian belanja operasional dan belanja modal pada keuangan daerah Kabupaten Tegal untuk periode tahun 2016-2019 ditunjukkan pada Tabel 4 dan Tabel 5. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada kedua tabel tersebut, perhitungan rasio keserasian yang terdiri atas rasio belanja modal dan rasio belanja investasi menunjukkan sejumlah dana Pemerintah Tegal dialokasikan untuk pengeluaran usaha atau investasi, sehingga rasio keserasian pada total belanja daerah masih dikategorikan rendah untuk periode tahun 2016–2019.

**Tabel 4. Rasio Keserasian Belanja Operasional Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016-2019**

Tahun Anggaran	Belanja Operasional (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasional
2016	1.546.321.787.664	2.070.201.492.705	74,69%
2017	1.611.513.759.083	2.056.964.445.808	78,34%
2018	1.704.320.211.333	2.126.439.309.268	80%
2019	1.637.467.847.000	2.866.763.483.000	57,1%

Sumber: BPS Kabupaten Tegal (2021) diolah.

**Tabel 5. Rasio Keserasian pada Belanja Modal Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016-2019**

Tahun Anggaran	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal
2016	516.642.310.814	2.070.201.492.705	24,95%
2017	437.758.902.809	2.056.964.445.808	21,28%
2018	417.983.021.935	2.126.439.309.268	19,63%
2019	434.393.482.658	2.866.763.483.000	16,80%

Sumber: BPS Kabupaten Tegal (2021) diolah.

## Rasio Desentralisasi Fiskal

Rekapitulasi rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Tegal periode tahun anggaran 2016-2019 ditampilkan pada Tabel 7. Derajat desentralisasi fiskal dapat menggambarkan kemampuan kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pada aspek keuangan daerah. Semakin tinggi angka realisasi PAD dibandingkan dengan total APBD, maka daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah mandiri. Daerah mandiri mampu mengelola sumber-sumber PADnya. Angka total APBD merupakan seluruh pendapatan daerah yang diperoleh secara sah. Data keuangan Kabupaten Tegal pada periode tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal berada pada posisi yang rendah.

**Tabel 7. Rekapitulasi Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016-2019**

Keterangan	Realisasi PAD	APBD	Rasio Desentralisasi Fiskal	Keterangan
2016	316.051.189.733,60	2.161.161.059.587,60	14,62%	Rendah
2017	375.531.165.351,20	2.450.766.552.130,20	15,32%	Rendah
2018	371.345.954.410,62	2.524.365.919.814,62	14,71%	Rendah
2019	416.867.970.000,00	2.755.677.484.152,29	15,12%	Rendah
<b>Rata-Rata</b>			<b>14,95%</b>	<b>Rendah</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tegal (2021) diolah.

Fluktuasi pada APBD dan realisasi PAD dan semakin baiknya derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal ternyata tidak serta merta membuat Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan desentralisasi fiskal. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal masih berada dalam kategori rendah. Artinya, Pemerintah Kabupaten Tegal belum mampu menyelenggarakan desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan potensi PAD dan pelayanan umum dengan lebih baik. Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan mampu memaksimalkan PAD yang bersumber dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain melalui pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Tegal sebaiknya mampu mengurangi alokasi belanjanya secara proporsional, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal. Pada perhitungan rasio pertumbuhan yang masih menunjukkan indikasi kurang baik, Pemerintah Kabupaten Tegal dapat lebih memperhatikan setiap aspeknya, terutama pada aspek pertumbuhan belanja modal yang masih sangat rendah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kemandirian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat relatif masih rendah. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Tegal memiliki pola instruktif, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan daripada tingkat kemandirian pemerintah daerah. Efektivitas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengelola PAD diindikasikan belum baik dan dikategorikan tidak efektif. Pemerintah Kabupaten Tegal memfungsikan dana secara tidak seimbang, karena mayoritas APBD

digunakan dalam pembelanjaan operasional, sedangkan rasio pembelanjaan modal masih rendah.

Pertumbuhan Kabupaten Tegal mengalami fluktuasi yang terlihat dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD. Kondisi tersebut disebabkan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Tegal setiap tahunnya. Di sisi lain, belanja operasional daerah mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan belanja modal. Rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal berfluktuasi dan berada pada kategori rendah yang diartikan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan potensi PAD untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih rinci dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, jangka waktu penelitian dapat lebih diperpanjang.

## DAFTAR REFERENSI

- Aditya, D., & Azmansyah, A. (2021). Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude, dan Income terhadap Financial Behavior pada Usaha Mikro kecil dan Menengah di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 32(2), 116–138.
- Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Iqtishaduna*, 4(1), 80–91.  
<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64>.
- Angraini, R. D. (2015). Analisis Kemampuan Daerah, Tingkat Kemandirian dan Efektivitas Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 4(1), 1–17.
- BPS Kabupaten Tegal (2021). Data Sensus Kabupaten Tegal. Tegal: Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 01 Desember 2021 di <https://tegalkab.bps.go.id/subject/13/keuangan.html>.
- Budiono, E. (2020). Analisis Financial Knowledge, Financial Attitude, Income, Locus of Control, Financial Management Behavior Masyarakat Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 284–295.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Hakim, L. (2020). Penolakan Hasil Rekapitulasi Suara oleh DPC Partai Gerindra pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Maros. *Tesis. Ilmu Politik*, Universitas Hasanuddin.
- Halim, A. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(1), 1–33.
- Istiqomah, N. (2018). Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional. *Indonesian Treasury Review: Jurnal*

*Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(2), 69–90.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v3i2.66>.

- Jaelani, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam. *Proceeding of International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES)*, 1(5), 1–26. Malang: Maulana Malik Ibrahim State Islamic University.
- Li, J., Wu, Y., & Xiao, J. J. (2020). The Impact of Digital Finance on Household Consumption: Evidence from China. *Economic Modelling*, 86, 317–326.
- Miharja, E. S., Handajani, L., & Furkan, L. M. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Sumbawa Barat. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 148–161. <https://doi.org/10.32400/iaj.28818>.
- Noor, J. (2016). *Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Pangkey, A. H. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2017). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 2848–2858. <https://doi.org/10.35794/emba.5.3.2017.17177>.
- Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(2), 87–100. <http://dx.doi.org/10.24269/iso.v3i2.291.g272>.
- Putriani, D. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daerah di Kota Palu. *e-Jurnal Katalogis*, 1(2), 59–66.
- Rahayu, Y. K. F., Sarwono, A. E., & Sunarti, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(Khusus), 443–450.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal Ilmiah Eka Cida*, 1(1), 40–54.
- Samalam, F. N. A., Mangantar, M., & Saerang, I. S. (2018). Pengaruh Return on Asset, Return on Equity dan Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham pada Perusahaan Asuransi di BEI Periode 2012-2016. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4), 3863–3872. <https://doi.org/10.35794/emba.v6i4.21912>.
- Satria, D. I., & Sari, H. P. (2018). Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 10(1), 9–21.
- Setianingrum, R. D., & Haryanto, H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2), 1–15.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.